



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 12 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NATUNA**



TAHUN ANGGARAN 2016



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 12 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 1).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

BAB I KETENTUAN UMUM

P a s a l 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri atas :

1. Pendapatan
 - a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 43.657.341.397,00
 - b. Dana Perimbangan Rp. 1.012.437.873.603,00
 - c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 99.404.785.000,00
- Jumlah Pendapatan Rp. 1.115.500.000.000,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	307.428.120.008,00
2) Belanja Bunga	Rp.	0,00
3) Belanja Subsidi	Rp.	21.305.597.302,00
4) Belanja Hibah	Rp.	12.656.099.500,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	16.220.849.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp.	558.170.010,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	141.328.433.467,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp.	<u>500.000.000,00</u>
	Rp.	499.997.269.277,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	99.924.030.000,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	296.709.976.311,00
3) Belanja Modal	Rp.	<u>258.868.724.412,00</u>
	Rp.	655.502.730.723,00
Jumlah Belanja	Rp.	<u>1.115.500.000.000,00</u>
Surplus / (Defisit)	Rp.	0,00

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp.	0,00
b. Pengeluaran	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp.	0,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan	Rp.	0,00

P a s a l 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada peraturan ini.

P a s a l 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

P a s a l 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 8 Maret 2016

BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABL I

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 8 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN **2016** NOMOR **12**

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
RINGKASAN PENJABARAN APBD
Tahun Anggaran 2016

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.	PENDAPATAN	
4. 1.	Pendapatan Asli Daerah	43,657,341,397.00
4. 1. 1.	Hasil Pajak Daerah	5,035,000,000.00
4. 1. 1. 01.	Pajak Hotel	160,000,000.00
4. 1. 1. 01. 06.	Hotel bintang satu	160,000,000.00
4. 1. 1. 02.	Pajak Restoran	1,750,000,000.00
4. 1. 1. 02. 01.	Restoran	1,750,000,000.00
4. 1. 1. 03.	Pajak Hiburan	70,000,000.00
4. 1. 1. 03. 02.	Pagelaran kesenian/musik/tari/busana	70,000,000.00
4. 1. 1. 04.	Pajak Reklame	22,000,000.00
4. 1. 1. 04. 01.	Reklame papan/bill board/vidiotron/megatron	22,000,000.00
4. 1. 1. 05.	Pajak Penerangan Jalan	2,300,000,000.00
4. 1. 1. 05. 01.	Pajak penerangan jalan PLN	2,300,000,000.00
4. 1. 1. 07.	Pajak Air Tanah	3,000,000.00
4. 1. 1. 07. 01.	Pajak air tanah	3,000,000.00
4. 1. 1. 10.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	600,000,000.00
4. 1. 1. 10. 01.	Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan	600,000,000.00
4. 1. 1. 11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	130,000,000.00
4. 1. 1. 11. 01.	Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	130,000,000.00
4. 1. 2.	Hasil Retribusi Daerah	546,500,000.00
4. 1. 2. 01.	Retribusi Jasa Umum	321,000,000.00
4. 1. 2. 01. 01.	Retribusi pelayanan kesehatan	321,000,000.00
4. 1. 2. 02.	Retribusi Jasa Usaha	58,500,000.00
4. 1. 2. 02. 09.	Retribusi pelayanan kepelabuhan	45,000,000.00
4. 1. 2. 02. 11.	Retribusi penyeberangan di air	13,500,000.00
4. 1. 2. 03.	Retribusi Perizinan Tertentu	167,000,000.00
4. 1. 2. 03. 01.	Retribusi izin mendirikan bangunan	99,000,000.00
4. 1. 2. 03. 03.	Retribusi izin gangguan	22,000,000.00
4. 1. 2. 03. 04.	Retribusi izin trayek	7,500,000.00
4. 1. 2. 03. 05.	Retribusi izin usaha perikanan	38,500,000.00
4. 1. 3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,000,000,000.00
4. 1. 3. 01.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	5,000,000,000.00
4. 1. 3. 01. 03.	Deviden BUMD	5,000,000,000.00
4. 1. 4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	33,075,841,397.00
4. 1. 4. 02.	Penerimaan Jasa Giro	3,000,020,000.00
4. 1. 4. 02. 01.	Jasa giro kas daerah	2,500,000,000.00
4. 1. 4. 02. 02.	Jasa giro pemegang kas	500,020,000.00
4. 1. 4. 03.	Pendapatan Bunga Deposito	8,875,821,397.00
4. 1. 4. 03. 01.	Rekening deposito pada bank	8,875,821,397.00
4. 1. 4. 15.	Pendapatan BLUD	20,000,000,000.00
4. 1. 4. 15. 01.	Pendapatan BLUD	20,000,000,000.00
4. 1. 4. 16.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1,200,000,000.00
4. 1. 4. 16. 01.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1,200,000,000.00
4. 2.	Dana Perimbangan	1,012,437,873,603.00
4. 2. 1.	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	505,649,039,553.00
4. 2. 1. 01.	Bagi Hasil Pajak	158,466,958,000.00
4. 2. 1. 01. 01.	Bagi hasil dari pajak bumi dan bangunan	141,149,555,000.00
4. 2. 1. 01. 02.	Bagi hasil dari pajak penghasilan (PPH) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPH pasal 21	12,483,568,000.00
4. 2. 1. 01. 03.	Bagi hasil dari biaya pungut PBB	4,577,900,000.00
4. 2. 1. 01. 04.	Bagi hasil cukai hasil tembakau	255,935,000.00
4. 2. 1. 02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	347,182,081,553.00
4. 2. 1. 02. 02.	Bagi hasil dari provisi sumber daya hutan	4,708,000.00
4. 2. 1. 02. 05.	Bagi hasil dari iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalti)	5,336,721,000.00
4. 2. 1. 02. 06.	Bagi hasil dari pungutan perusahaan perikanan	1,089,194,000.00
4. 2. 1. 02. 08.	Bagi hasil dari pertambangan minyak bumi	17,337,748,087.00
4. 2. 1. 02. 09.	Bagi hasil dari pertambangan gas bumi	323,413,710,466.00
4. 2. 2.	Dana Alokasi Umum	345,284,029,000.00
4. 2. 2. 01.	Dana Alokasi Umum	345,284,029,000.00
4. 2. 2. 01. 01.	Dana alokasi umum	345,284,029,000.00
4. 2. 3.	Dana Alokasi Khusus	161,504,805,050.00
4. 2. 3. 01.	Dana Alokasi Khusus Fisik	149,769,990,000.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
4. 2. 3. 01. 01.	DAK pendidikan	6,209,610,000.00
4. 2. 3. 01. 02.	DAK kesehatan dan KB	34,521,020,000.00
4. 2. 3. 01. 03.	DAK infrastruktur perumahan, pemukiman, air minum dan sanitasi	12,725,560,000.00
4. 2. 3. 01. 04.	DAK kedaulatan pangan	9,273,190,000.00
4. 2. 3. 01. 06.	DAK kelautan dan perikanan	18,940,230,000.00
4. 2. 3. 01. 08.	DAK lingkungan hidup dan kehutanan	2,734,020,000.00
4. 2. 3. 01. 09.	DAK transportasi	62,983,140,000.00
4. 2. 3. 01. 10.	DAK sarana perdagangan dan industri	2,383,220,000.00
4. 2. 3. 02.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	11,734,815,050.00
4. 2. 3. 02. 02.	Tambahan penghasilan guru PNSD	5,791,191,000.00
4. 2. 3. 02. 04.	Bantuan operasional PAUD (BOP)	1,656,000,000.00
4. 2. 3. 02. 05.	Bantuan operasional kesehatan (BOK)	2,616,781,250.00
4. 2. 3. 02. 06.	Bantuan operasional kesehatan (BOK) akreditasi rumah sakit	415,960,000.00
4. 2. 3. 02. 07.	Bantuan operasional kesehatan (BOK) akreditasi puskesmas	259,422,000.00
4. 2. 3. 02. 08.	Bantuan operasional kesehatan (BOK) jaminan persalinan	970,980,800.00
4. 2. 3. 02. 09.	Bantuan operasional keluarga berencana (BOKB)	24,480,000.00
4. 3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	99,404,785,000.00
4. 3. 3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	55,034,003,000.00
4. 3. 3. 01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	55,034,003,000.00
4. 3. 3. 01. 01.	Bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor	6,931,064,000.00
4. 3. 3. 01. 02.	Bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor	5,558,752,000.00
4. 3. 3. 01. 03.	Bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor	36,846,000,000.00
4. 3. 3. 01. 04.	Bagi hasil dari pajak air permukaan	204,307,000.00
4. 3. 3. 01. 07.	Bagi hasil dari pajak rokok	5,493,880,000.00
4. 3. 4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	44,370,782,000.00
4. 3. 4. 03.	Dana Desa	44,370,782,000.00
4. 3. 4. 03. 01.	Dana desa	44,370,782,000.00
	Jumlah	1,155,500,000,000.00
5.	BELANJA	
5. 1.	Belanja Tidak Langsung	499,997,269,277.00
5. 1. 1.	Belanja Pegawai	307,428,120,008.00
5. 1. 1. 01.	Gaji dan Tunjangan	167,530,152,830.00
5. 1. 1. 01. 01.	Gaji pokok PNS/uang representasi 1)	119,107,088,285.00
5. 1. 1. 01. 02.	Tunjangan keluarga	11,789,301,490.00
5. 1. 1. 01. 03.	Tunjangan jabatan 1)	7,114,660,000.00
5. 1. 1. 01. 04.	Tunjangan fungsional	5,062,629,875.00
5. 1. 1. 01. 06.	Tunjangan beras 1)	8,459,154,156.00
5. 1. 1. 01. 07.	Tunjangan PPh/tunjangan khusus	2,349,211,024.00
5. 1. 1. 01. 08.	Pembulatan gaji	3,168,000.00
5. 1. 1. 01. 09.	Iuran asuransi kesehatan	3,533,403,000.00
5. 1. 1. 01. 10.	Uang paket 2)	47,412,000.00
5. 1. 1. 01. 11.	Tunjangan panitia musyawarah 2)	20,176,000.00
5. 1. 1. 01. 12.	Tunjangan komisi 2)	31,297,000.00
5. 1. 1. 01. 13.	Tunjangan panitia anggaran 2)	18,626,000.00
5. 1. 1. 01. 14.	Tunjangan badan kehormatan 2)	15,598,000.00
5. 1. 1. 01. 15.	Tunjangan alat kelengkapan lainnya 2)	16,330,000.00
5. 1. 1. 01. 16.	Tunjangan perumahan 2)	3,886,000,000.00
5. 1. 1. 01. 17.	Uang duka wafat/tebas 2)	206,420,000.00
5. 1. 1. 01. 18.	Uang jasa pengabdian 2)	202,333,000.00
5. 1. 1. 01. 19.	Belanja penunjang operasional pimpinan DPRD	570,360,000.00
5. 1. 1. 01. 21.	Tunjangan umum	3,596,985,000.00
5. 1. 1. 01. 22.	Iuran jaminan kecelakaan kerja	667,500,000.00
5. 1. 1. 01. 23.	Iuran jaminan kematian	832,500,000.00
5. 1. 1. 02.	Tambahan Penghasilan PNS	137,650,892,178.00
5. 1. 1. 02. 01.	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	6,361,340,000.00
5. 1. 1. 02. 02.	Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas	72,700,484,178.00
5. 1. 1. 02. 03.	Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja	22,442,920,000.00
5. 1. 1. 02. 04.	Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	9,826,740,000.00
5. 1. 1. 02. 07.	Tambahan penghasilan Guru PNSD	5,791,191,000.00
5. 1. 1. 02. 08.	Tunjangan profesi Guru PNSD	20,528,217,000.00
5. 1. 1. 03.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1,968,000,000.00
5. 1. 1. 03. 01.	Tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD	1,638,000,000.00
5. 1. 1. 03. 02.	Belanja penunjang operasional KDH/WKDH	330,000,000.00
5. 1. 1. 05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	251,750,000.00
5. 1. 1. 05. 01.	Insentif pemungutan pajak daerah	251,750,000.00
5. 1. 1. 06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	27,325,000.00
5. 1. 1. 06. 01.	Insentif pemungutan retribusi daerah	27,325,000.00
5. 1. 3.	Belanja Subsidi	21,305,597,302.00
5. 1. 3. 01.	Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga	20,478,192,877.00
5. 1. 3. 01. 01.	Belanja subsidi kepada perusahaan	20,478,192,877.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5. 1. 3. 02.	Belanja Subsidi kepada Masyarakat/Perorangan	827,404,425.00
5. 1. 3. 02. 01.	Belanja subsidi kepada rumah tangga miskin (RTM)	827,404,425.00
5. 1. 4.	Belanja Hibah	12,656,099,500.00
5. 1. 4. 01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	9,010,099,500.00
5. 1. 4. 01. 01.	Pemerintah pusat	9,010,099,500.00
5. 1. 4. 05.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	3,646,000,000.00
5. 1. 4. 05. 01.	Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi bidang keagamaan	1,990,000,000.00
5. 1. 4. 05. 09.	Belanja Hibah BOP PAUD	1,656,000,000.00
5. 1. 5.	Belanja Bantuan Sosial	16,220,849,000.00
5. 1. 5. 01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Masyarakat	700,000,000.00
5. 1. 5. 01. 03.	Belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan untuk pemberdayaan sosial	700,000,000.00
5. 1. 5. 02.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	12,736,850,000.00
5. 1. 5. 02. 05.	Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan	12,736,850,000.00
5. 1. 5. 03.	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	2,783,999,000.00
5. 1. 5. 03. 02.	Belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat untuk perlindungan sosial	1,283,999,000.00
5. 1. 5. 03. 04.	Belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat untuk jaminan sosial	1,500,000,000.00
5. 1. 6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	558,170,000.00
5. 1. 6. 03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	503,500,000.00
5. 1. 6. 03. 01.	Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa	503,500,000.00
5. 1. 6. 05.	Belanja Bagi Hasil Restribusi Daerah kepada Pemerintah Desa	54,670,000.00
5. 1. 6. 05. 01.	Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintahan desa	54,670,000.00
5. 1. 7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	141,328,433,467.00
5. 1. 7. 03.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	140,038,448,025.00
5. 1. 7. 03. 01.	Belanja alokasi dana desa	95,667,666,025.00
5. 1. 7. 03. 02.	Belanja dana desa	44,370,782,000.00
5. 1. 7. 04.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa Lainnya	290,000,000.00
5. 1. 7. 04. 03.	Belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa	290,000,000.00
5. 1. 7. 05.	Belanja Bantuan kepada Partai Politik	999,985,442.00
5. 1. 7. 05. 01.	Belanja bantuan kepada partai politik	999,985,442.00
5. 1. 8.	Belanja Tidak Terduga	500,000,000.00
5. 1. 8. 01.	Belanja Tidak Terduga	500,000,000.00
5. 1. 8. 01. 01.	Belanja tidak terduga	500,000,000.00
5. 2.	Belanja Langsung	655,502,730,723.00
5. 2. 1.	Belanja Pegawai	99,924,030,000.00
5. 2. 1. 01.	Honorarium PNS	26,130,042,000.00
5. 2. 1. 01. 01.	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	13,567,450,000.00
5. 2. 1. 01. 02.	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	307,290,000.00
5. 2. 1. 01. 03.	Honorarium pejabat dan staf pelaksana teknis kegiatan	7,414,060,000.00
5. 2. 1. 01. 04.	Honorarium panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan	339,860,000.00
5. 2. 1. 01. 05.	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/fasilitator PNS	72,500,000.00
5. 2. 1. 01. 06.	Honorarium petugas/pengawas lapangan/peserta kegiatan	4,428,882,000.00
5. 2. 1. 02.	Honorarium Non PNS	72,386,188,000.00
5. 2. 1. 02. 02.	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	57,116,943,000.00
5. 2. 1. 02. 03.	Honorarium staf administrasi kegiatan	2,915,800,000.00
5. 2. 1. 02. 04.	Honorarium petugas/pengawas lapangan/peserta kegiatan	10,242,745,000.00
5. 2. 1. 02. 05.	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	2,110,700,000.00
5. 2. 1. 03.	Uang Lembur	3,300,000.00
5. 2. 1. 03. 01.	Uang lembur PNS	1,200,000.00
5. 2. 1. 03. 02.	Uang lembur non PNS	2,100,000.00
5. 2. 1. 05.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4,500,000.00
5. 2. 1. 05. 01.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	4,500,000.00
5. 2. 1. 06.	Belanja Pegawai BLUD	1,400,000,000.00
5. 2. 1. 06. 01.	Belanja pegawai BLUD	1,400,000,000.00
5. 2. 2.	Belanja Barang dan Jasa	296,709,976,311.00
5. 2. 2. 01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11,556,593,628.00
5. 2. 2. 01. 01.	Belanja alat tulis kantor	4,533,061,796.00
5. 2. 2. 01. 02.	Belanja dokumentasi/administrasi tender	49,962,000.00
5. 2. 2. 01. 03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	538,050,000.00
5. 2. 2. 01. 04.	Belanja perangk, materai, dan benda pos lainnya	851,811,347.00
5. 2. 2. 01. 05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	985,919,000.00
5. 2. 2. 01. 06.	Belanja bahan bakar minyak/gas	3,300,774,485.00
5. 2. 2. 01. 08.	Belanja pengisian tabung gas	1,800,000.00
5. 2. 2. 01. 09.	Belanja spanduk	1,013,315,000.00
5. 2. 2. 01. 10.	Belanja dekorasi	281,900,000.00
5. 2. 2. 02.	Belanja Bahan/Material	15,158,663,998.00
5. 2. 2. 02. 01.	Belanja bahan baku bangunan	162,875,000.00
5. 2. 2. 02. 02.	Belanja bahan/bibit tanaman	102,375,000.00
5. 2. 2. 02. 03.	Belanja bibit ternak	207,500,000.00
5. 2. 2. 02. 04.	Belanja bahan obat-obatan	10,529,408,398.00
5. 2. 2. 02. 05.	Belanja bahan kimia	248,200,000.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5. 2. 2. 02. 06.	Belanja bahan alat-alat olahraga	105,420,000.00
5. 2. 2. 02. 07.	Belanja alat perlengkapan	3,449,277,600.00
5. 2. 2. 02. 08.	Belanja material/hadiah	353,608,000.00
5. 2. 2. 03.	Belanja Jasa Kantor	46,047,161,995.00
5. 2. 2. 03. 01.	Belanja air	560,900,000.00
5. 2. 2. 03. 02.	Belanja telepon	252,800,000.00
5. 2. 2. 03. 03.	Belanja listrik	5,696,733,000.00
5. 2. 2. 03. 05.	Belanja surat kabar/majalah	1,398,880,000.00
5. 2. 2. 03. 06.	Belanja kawat/faksimili/internet	4,672,488,000.00
5. 2. 2. 03. 07.	Belanja paket/pengiriman	553,342,750.00
5. 2. 2. 03. 08.	Belanja sertifikasi	233,061,000.00
5. 2. 2. 03. 13.	Belanja jasa medis/laboratorium	19,997,897,458.00
5. 2. 2. 03. 14.	Belanja jasa kebersihan	2,804,523,382.00
5. 2. 2. 03. 15.	Belanja jasa kesenian	318,400,000.00
5. 2. 2. 03. 16.	Belanja jasa administrasi	2,532,209,000.00
5. 2. 2. 03. 17.	Belanja jasa publikasi	1,895,690,000.00
5. 2. 2. 03. 19.	Belanja jasa humas	3,868,411,000.00
5. 2. 2. 03. 21.	Belanja jasa keamanan	510,006,405.00
5. 2. 2. 03. 22.	Belanja perangkat lunak (software)	30,000,000.00
5. 2. 2. 03. 23.	Belanja jasa pengolahan data	30,500,000.00
5. 2. 2. 03. 24.	Belanja upah	691,320,000.00
5. 2. 2. 05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8,478,209,300.00
5. 2. 2. 05. 01.	Belanja jasa service	1,939,897,800.00
5. 2. 2. 05. 02.	Belanja penggantian suku cadang	2,202,791,000.00
5. 2. 2. 05. 03.	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	3,838,190,500.00
5. 2. 2. 05. 05.	Belanja surat tanda nomor kendaraan	487,330,000.00
5. 2. 2. 05. 06.	Belanja perpanjangan surat izin mengemudi	10,000,000.00
5. 2. 2. 06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9,629,617,485.00
5. 2. 2. 06. 01.	Belanja cetak	5,841,249,880.00
5. 2. 2. 06. 02.	Belanja penggandaan	3,435,429,505.00
5. 2. 2. 06. 03.	Belanja dokumentasi	352,938,100.00
5. 2. 2. 07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,201,649,275.00
5. 2. 2. 07. 01.	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	480,000,000.00
5. 2. 2. 07. 02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	2,467,670,000.00
5. 2. 2. 07. 03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	253,979,275.00
5. 2. 2. 08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,065,804,526.00
5. 2. 2. 08. 01.	Belanja sewa sarana mobilitas darat	1,360,517,540.00
5. 2. 2. 08. 02.	Belanja sewa sarana mobilitas air	1,705,286,986.00
5. 2. 2. 10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	608,700,000.00
5. 2. 2. 10. 01.	Belanja sewa meja kursi	26,000,000.00
5. 2. 2. 10. 03.	Belanja sewa proyektor	20,000,000.00
5. 2. 2. 10. 04.	Belanja sewa generator	1,000,000.00
5. 2. 2. 10. 05.	Belanja sewa tenda	134,500,000.00
5. 2. 2. 10. 07.	Belanja sewa peralatan sound sistem	400,000,000.00
5. 2. 2. 10. 08.	Belanja sewa peralatan survey	27,200,000.00
5. 2. 2. 11.	Belanja Makanan dan Minuman	18,458,023,468.00
5. 2. 2. 11. 01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2,904,846,600.00
5. 2. 2. 11. 02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2,736,940,778.00
5. 2. 2. 11. 03.	Belanja makanan dan minuman tamu	1,761,211,000.00
5. 2. 2. 11. 04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9,647,792,090.00
5. 2. 2. 11. 05.	Belanja makanan dan minuman pelajar/siswa	1,045,769,000.00
5. 2. 2. 11. 06.	Belanja makanan dan minuman pasien	361,464,000.00
5. 2. 2. 12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	329,612,900.00
5. 2. 2. 12. 01.	Belanja pakaian dinas KDH dan WKDH	8,951,000.00
5. 2. 2. 12. 02.	Belanja pakaian sipil harian (PSH)	77,971,000.00
5. 2. 2. 12. 03.	Belanja pakaian sipil lengkap (PSL)	19,312,900.00
5. 2. 2. 12. 05.	Belanja pakaian dinas upacara (PDU)	110,000,000.00
5. 2. 2. 12. 06.	Belanja pakaian sipil resmi (PSR)	38,830,000.00
5. 2. 2. 12. 08.	Belanja atribut	74,548,000.00
5. 2. 2. 13.	Belanja Pakaian Kerja	154,192,000.00
5. 2. 2. 13. 01.	Belanja pakaian kerja lapangan	154,192,000.00
5. 2. 2. 14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1,062,434,975.00
5. 2. 2. 14. 01.	Belanja pakaian KORPRI	3,206,100.00
5. 2. 2. 14. 02.	Belanja pakaian adat daerah	365,785,575.00
5. 2. 2. 14. 03.	Belanja pakaian batik tradisional	48,500,000.00
5. 2. 2. 14. 04.	Belanja pakaian olahraga	271,170,000.00
5. 2. 2. 14. 05.	Belanja pakaian muslim	20,700,000.00
5. 2. 2. 14. 06.	Belanja pakaian seragam	252,408,800.00
5. 2. 2. 14. 07.	Belanja pakaian kegiatan	100,664,500.00
5. 2. 2. 15.	Belanja Perjalanan Dinas	91,949,010,000.00
5. 2. 2. 15. 01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	34,010,907,000.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5. 2. 2. 15. 02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	57,938,103,000.00
5. 2. 2. 16.	Belanja Bea Siswa Pendidikan PNS	865,000,000.00
5. 2. 2. 16. 01.	Belanja beasiswa tugas belajar D3	175,000,000.00
5. 2. 2. 16. 02.	Belanja beasiswa tugas belajar S1	600,000,000.00
5. 2. 2. 16. 03.	Belanja beasiswa tugas belajar S2	90,000,000.00
5. 2. 2. 17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	741,800,000.00
5. 2. 2. 17. 01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	553,800,000.00
5. 2. 2. 17. 06.	Belanja kontribusi diklat struktural	188,000,000.00
5. 2. 2. 20.	Belanja Pemeliharaan	16,760,384,300.00
5. 2. 2. 20. 01.	Belanja pemeliharaan jalan	394,400,000.00
5. 2. 2. 20. 03.	Belanja pemeliharaan bangunan	9,616,602,300.00
5. 2. 2. 20. 04.	Belanja pemeliharaan jaringan	181,700,000.00
5. 2. 2. 20. 05.	Belanja pemeliharaan peralatan	4,091,771,000.00
5. 2. 2. 20. 07.	Belanja pemeliharaan sistem komputerisasi (software)	386,575,000.00
5. 2. 2. 20. 08.	Belanja pemeliharaan lahan	1,811,881,000.00
5. 2. 2. 20. 09.	Belanja pemeliharaan perlengkapan	277,455,000.00
5. 2. 2. 21.	Belanja Jasa Konsultasi	11,645,360,777.00
5. 2. 2. 21. 01.	Belanja jasa konsultasi penelitian	1,283,450,000.00
5. 2. 2. 21. 02.	Belanja jasa konsultasi perencanaan	3,829,434,681.00
5. 2. 2. 21. 03.	Belanja jasa konsultasi pengawasan	5,347,051,096.00
5. 2. 2. 21. 04.	Belanja jasa konsultasi manajemen	1,140,425,000.00
5. 2. 2. 21. 05.	Belanja jasa konsultasi IT	45,000,000.00
5. 2. 2. 23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	16,548,513,560.00
5. 2. 2. 23. 01.	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	13,848,211,860.00
5. 2. 2. 23. 02.	Belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	2,700,301,700.00
5. 2. 2. 25.	Belanja Barang Dana BROS	14,503,213,324.00
5. 2. 2. 25. 01.	Belanja barang BROS	14,503,213,324.00
5. 2. 2. 26.	Belanja Honorarium PNS	5,084,340,000.00
5. 2. 2. 26. 01.	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/fasilitator PNS	5,084,340,000.00
5. 2. 2. 27.	Belanja Honorarium Non PNS	3,616,255,000.00
5. 2. 2. 27. 01.	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	3,616,255,000.00
5. 2. 2. 28.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	16,433,515,800.00
5. 2. 2. 28. 01.	Belanja barang dan jasa BLUD	16,433,515,800.00
5. 2. 2. 29.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	811,920,000.00
5. 2. 2. 29. 02.	Uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat	811,920,000.00
5. 2. 3.	Belanja Modal	258,868,724,412.00
5. 2. 3. 01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	838,765,000.00
5. 2. 3. 01. 14.	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum dermaga	838,765,000.00
5. 2. 3. 03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	7,328,980,100.00
5. 2. 3. 03. 05.	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	5,518,960,000.00
5. 2. 3. 03. 06.	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck	360,000,000.00
5. 2. 3. 03. 08.	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor boks	500,000,000.00
5. 2. 3. 03. 10.	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans	350,000,000.00
5. 2. 3. 03. 12.	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	600,020,100.00
5. 2. 3. 05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	5,484,633,000.00
5. 2. 3. 05. 01.	Belanja modal pengadaan kapal motor	1,400,938,000.00
5. 2. 3. 05. 02.	Belanja modal pengadaan kapal feri	4,083,695,000.00
5. 2. 3. 08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	2,345,519,696.00
5. 2. 3. 08. 05.	Belanja modal pengadaan mesin generator	2,305,519,696.00
5. 2. 3. 08. 06.	Belanja modal pengadaan peralatan bengkel	40,000,000.00
5. 2. 3. 09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	389,900,000.00
5. 2. 3. 09. 06.	Belanja modal pengadaan pompa air	4,000,000.00
5. 2. 3. 09. 07.	Belanja modal pengadaan mesin pengolahan	385,900,000.00
5. 2. 3. 10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	464,826,040.00
5. 2. 3. 10. 08.	Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas	7,500,000.00
5. 2. 3. 10. 11.	Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran	5,500,000.00
5. 2. 3. 10. 12.	Belanja modal pengadaan alat pendingin ruangan	181,684,840.00
5. 2. 3. 10. 16.	Belanja modal pengadaan penghisap debu	12,990,000.00
5. 2. 3. 10. 17.	Belanja modal pengadaan papan plang kantor	114,500,000.00
5. 2. 3. 10. 20.	Belanja modal pengadaan kipas angin	30,979,200.00
5. 2. 3. 10. 21.	Belanja modal pengadaan TV	111,672,000.00
5. 2. 3. 11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	832,181,500.00
5. 2. 3. 11. 02.	Belanja modal pengadaan almari	152,380,000.00
5. 2. 3. 11. 03.	Belanja modal pengadaan brankas	50,000,000.00
5. 2. 3. 11. 04.	Belanja modal pengadaan filling kabinet	51,000,000.00
5. 2. 3. 11. 05.	Belanja modal pengadaan white board	13,801,500.00
5. 2. 3. 11. 07.	Belanja modal pengadaan hiasan ruang kantor	500,000,000.00
5. 2. 3. 11. 08.	Belanja modal pengadaan papan pengumuman	15,000,000.00
5. 2. 3. 11. 10.	Belanja modal pengadaan tenda	50,000,000.00
5. 2. 3. 12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1,477,069,050.00
5. 2. 3. 12. 01.	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server	297,300,000.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5. 2. 3. 12. 02.	Belanja modal pengadaan komputer/PC	321,830,730.00
5. 2. 3. 12. 03.	Belanja modal pengadaan komputer note book	566,510,600.00
5. 2. 3. 12. 04.	Belanja modal pengadaan printer	121,076,920.00
5. 2. 3. 12. 05.	Belanja modal pengadaan scanner	16,500,000.00
5. 2. 3. 12. 08.	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	31,430,800.00
5. 2. 3. 12. 09.	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flasdisk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	12,420,000.00
5. 2. 3. 12. 11.	Belanja modal pengadaan software/aplikasi komputer	110,000,000.00
5. 2. 3. 13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	5,184,492,196.00
5. 2. 3. 13. 01.	Belanja modal pengadaan meja kerja	591,829,100.00
5. 2. 3. 13. 02.	Belanja modal pengadaan meja rapat	38,432,000.00
5. 2. 3. 13. 03.	Belanja modal pengadaan meja makan	154,100,000.00
5. 2. 3. 13. 04.	Belanja modal pengadaan kursi kerja	567,544,500.00
5. 2. 3. 13. 05.	Belanja modal pengadaan kursi rapat	203,700,000.00
5. 2. 3. 13. 06.	Belanja modal pengadaan kursi makan	8,000,000.00
5. 2. 3. 13. 07.	Belanja modal pengadaan tempat tidur	570,400,000.00
5. 2. 3. 13. 08.	Belanja modal pengadaan sofa	642,346,200.00
5. 2. 3. 13. 09.	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	1,482,778,900.00
5. 2. 3. 13. 10.	Belanja modal pengadaan kursi sekolah	179,263,798.00
5. 2. 3. 13. 11.	Belanja modal pengadaan meja sekolah	268,895,698.00
5. 2. 3. 13. 12.	Belanja modal pengadaan meja resepsionis	178,002,000.00
5. 2. 3. 13. 13.	Belanja modal pengadaan kursi tunggu	299,200,000.00
5. 2. 3. 14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	415,224,200.00
5. 2. 3. 14. 01.	Belanja modal pengadaan tabung gas	6,000,000.00
5. 2. 3. 14. 02.	Belanja modal pengadaan kompor gas	10,500,000.00
5. 2. 3. 14. 03.	Belanja modal pengadaan lemari makan	83,088,000.00
5. 2. 3. 14. 04.	Belanja modal pengadaan dispenser	13,467,000.00
5. 2. 3. 14. 05.	Belanja modal pengadaan kulkas	218,769,200.00
5. 2. 3. 14. 06.	Belanja modal pengadaan rak piring	11,400,000.00
5. 2. 3. 14. 07.	Belanja modal pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	72,000,000.00
5. 2. 3. 15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	215,965,345.00
5. 2. 3. 15. 03.	Belanja modal pengadaan karpet	129,000,000.00
5. 2. 3. 15. 04.	Belanja modal pengadaan gorden/tirai	86,965,345.00
5. 2. 3. 16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	482,369,500.00
5. 2. 3. 16. 01.	Belanja modal pengadaan kamera	96,458,500.00
5. 2. 3. 16. 02.	Belanja modal pengadaan handycam	42,000,000.00
5. 2. 3. 16. 03.	Belanja modal pengadaan proyektor	113,120,000.00
5. 2. 3. 16. 05.	Belanja modal pengadaan sound system	191,200,000.00
5. 2. 3. 16. 06.	Belanja modal pengadaan alat perekam	39,591,000.00
5. 2. 3. 19.	Belanja Modal pengadaan Alat-alat Kedokteran	9,467,018,400.00
5. 2. 3. 19. 01.	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum	6,389,818,665.00
5. 2. 3. 19. 05.	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran bedah	1,915,485,085.00
5. 2. 3. 19. 07.	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan	961,714,650.00
5. 2. 3. 19. 13.	Belanja modal pengadaan alat-alat farmasi	200,000,000.00
5. 2. 3. 20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	9,366,950,129.00
5. 2. 3. 20. 09.	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium penguji kualitas air	1,324,750,000.00
5. 2. 3. 20. 10.	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah	7,442,200,129.00
5. 2. 3. 20. 11.	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium kesehatan	600,000,000.00
5. 2. 3. 21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	102,866,909,500.00
5. 2. 3. 21. 04.	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan lapis hotmix	53,100,861,000.00
5. 2. 3. 21. 06.	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan beton bertulang	12,943,640,900.00
5. 2. 3. 21. 08.	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan tanah	36,822,407,600.00
5. 2. 3. 23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	15,488,859,500.00
5. 2. 3. 23. 05.	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi	4,526,025,000.00
5. 2. 3. 23. 06.	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	6,444,134,500.00
5. 2. 3. 23. 10.	Belanja modal pengadaan konstruksi drainase	571,200,000.00
5. 2. 3. 23. 12.	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan limbah	3,083,000,000.00
5. 2. 3. 23. 13.	Belanja modal pengadaan konstruksi instalasi jaringan air	864,500,000.00
5. 2. 3. 24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan jalan, Taman dan Hutan Kota	285,200,000.00
5. 2. 3. 24. 04.	Belanja modal pengadaan lampu penerangan jalan	285,200,000.00
5. 2. 3. 25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	1,361,919,000.00
5. 2. 3. 25. 01.	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	1,261,919,000.00
5. 2. 3. 25. 02.	Belanja modal pengadaan instalasi telepon	100,000,000.00
5. 2. 3. 26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	91,675,956,256.00
5. 2. 3. 26. 01.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	10,250,316,700.00
5. 2. 3. 26. 04.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	707,480,000.00
5. 2. 3. 26. 08.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian pelabuhan/tambatan perahu	3,447,036,700.00
5. 2. 3. 26. 09.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung/tempat	7,026,915,356.00
5. 2. 3. 26. 10.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bandar udara	32,492,865,000.00
5. 2. 3. 26. 11.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian tugu batas/patok batas	81,211,000.00
5. 2. 3. 26. 12.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan lainnya	37,670,131,500.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5. 2. 3. 27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1,380,026,000.00
5. 2. 3. 27. 13.	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	1,380,026,000.00
5. 2. 3. 28.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	6,000,000.00
5. 2. 3. 28. 04.	Belanja modal pengadaan pahatan	6,000,000.00
5. 2. 3. 29.	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	194,600,000.00
5. 2. 3. 29. 03.	Belanja modal pengadaan tanaman	194,600,000.00
5. 2. 3. 30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	200,000,000.00
5. 2. 3. 30. 07.	Belanja modal pengadaan detektor logam	200,000,000.00
5. 2. 3. 32.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Lainnya	715,360,000.00
5. 2. 3. 32. 02.	Belanja modal pengadaan papan reklame/iklan	91,980,000.00
5. 2. 3. 32. 03.	Belanja modal pengadaan marka/rambu-rambu	540,880,000.00
5. 2. 3. 32. 09.	Belanja modal pengadaan alat-alat selam	55,000,000.00
5. 2. 3. 32. 11.	Belanja modal pengadaan alat vacuum sealer	12,000,000.00
5. 2. 3. 32. 12.	Belanja modal pengadaan alat continuous sealer	6,000,000.00
5. 2. 3. 32. 13.	Belanja modal pengadaan alat hand sealer	1,000,000.00
5. 2. 3. 32. 14.	Belanja modal pengadaan hand printer	2,500,000.00
5. 2. 3. 32. 15.	Belanja modal pengadaan mesin spinner	6,000,000.00
5. 2. 3. 33.	Belanja Modal BLUD	400,000,000.00
5. 2. 3. 33. 01.	Belanja modal BLUD	400,000,000.00
	Jumlah	1,155,500,000,000.00
	Surplus / (Defisit)	0
	Pembiayaan neto	0
	Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA/SIKPA)	0

Ranai, 8 Maret 2016
BUPATI

ILYAS SABL I